PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI PEMBATAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN

Oleh : Hasnati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Alamat: Jln. Yos Sudarso km 8 Rumbai, Pekanbaru Telp. 0761 51877

Abstrak

Doktrin penyalahgunaan keadaan lahir sebagai batasan akan perkembangan dari asas kebebasan berkontrak yang sewenang-wenang dan lahir karena adanya posisi tawar yang tidak seimbang di antara para pihak yang saling mengikatkan diri. Di Indonesia, penyalahgunaan keadaan tidak diatur di dalam KUHPerdara, namun terdapat dalam yurisprudensi. Ketidakeimbangan posisi tawar dalam perjanjian memberikan kesempatan bagi pihak dengan posisi tawar kuat untuk mempengaruhi pihak dengan posisi tawar lemah disebabkan faktor ekonomi dan psikologis. Akibatnya, pihak lemah tidak memiliki kebebasan dalam menyatakan kehendaknya. Cacat kehendak atau cacat kesepakatan ini memiliki konsekuensi hukum dapat dibatalkannya perjanjian itu oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Abstract

Undue influence was created as result of freedom of contract which is one party have more powerful position than others. This doctrine never been provide within our Civil Code (KUHPerdara). In fact, undue influence provide within adjudication. Inequality bargaining position between the parties in contract gives a change to stronger party to influence the weaker. The result is, the weaker has no freedom to declare his assent.

Kata kunci: penyalahgunaan keadaan, perjanjian, posisi tawar yang tidak seimbang

Berkembangnya asas kebebasan berkontrak yang berkembang selama ini yang dianut oleh para pihak dalam membuat perjanjian telah

melahirkan dua doktrin, salah satunya adalah doktrin penyalahgunaan keadaan. Dalam penyalahgunaan keadaan ada suatu kondisi di mana para pihak memiliki posisi tawar yang tidak seimbang. Akibatnya, terjadi suatu ketidakadilan pada pihak yang lain. Posisi yang tidak seimbang antara pihak yang satu dengan pihak yang lain menyebabkan pihak dengan posisi tawar yang jauh lebih baik dapat melakukan penyalahgunaan keadaan. Namun demikian, sangat sulit untuk membuktikan telah terjadi penyalahgunaan keadaan. Apa yang membuat penyalahgunaan keadaan berbeda dari kecurangan, penipuan, dan kelalaian dalam kontrak? Terdapat motif ekonomi dibalik penyalahgunaan keadaan oleh satu pihak terhadap pihak lain dalam kontrak. Pihak dengan posisi tawar lebih tinggi, yaitu dengan kekuatan ekonomi yang lebih baik daripada pihak lain, dapat melakukan penyalahgunaan keadaan tersebut. Posisi yang tidak seimbang tersebut tentu membawa pada sebuah ketidakadilan dalam berkontrak pada salah satu pihak terhadap pihak lainnya yang memiliki posisi tawar lebih rendah.

Salah satu pembatalan kontrak karena alasan terdapat penyalahgunaan keadaan adalah kasus

gugatan wanprestrasi *Aquarius Musikindo vs Dewa*. Gugatan wanprestasi PT Aquarius Musikindo terhadap lima personil Band Dewa diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa Aquarius telah melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam pembuatan perjanjian jual beli *master* rekaman pada 12 Juli 2004. Karena perjanjian tersebut dibuat oleh para personil Dewa dalam keadaan tidak bebas, maka perjanjian dapat dibatalkan. Kekuasaan ekonomi yang disalahgunakan akan mengganggu keseimbangan. Keberadaan syarat yang tidak masuk akal, atau bertentangan dengan perikemanusiaan, penyalahgunaan keadaan, atau ada *unfair contract terms* dapat membuat suatu perjanjian dibatalkan.¹

Penyalahgunaan keadaan yang dilakukan Aquarius terhadap Dewa, dalam perjanjian lanjutan untuk mengakhiri hubungan keduanya, mengakibatkan adanya cacat atau ketiadaan kebebasan artis dalam menentukan kehendak. Dengan demikian, tidak terpenuhi salah satu syarat adanya kesepakatan sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata.

Ada beberapa syarat di mana penyalahgunaan keadaan atas

¹ Hukumonline, "Ada Penyalahgunaan Keadaan, Kontrak Aquarius-Dewa Dibatalkan," <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18173&cl=Berita>, akses data 6 Agustus 2009.

kelemahan posisi tawar pihak lain dapat dibuktikan, yaitu kelemahan (*susceptibility*), *confidential relation-ship*, dan *active procurement*. Apabila dapat dibuktikan telah terjadi penyalahgunaan keadaan dalam suatu kontrak, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya.

Prasyarat Perjanjian: Persesuaian Kehendak Antara Para Pihak

Perjanjian ataupun kontrak pada dasarnya adalah dua pihak/negosiator dengan posisi tawar yang seimbang yang melakukan tawar-menawar dengan tanpa paksaan, secara sukarela menyetujui semua isi perjanjian atau kontrak, dan menyepakati serta memiliki pemahaman yang sama atas isi dan tujuan dari perjanjian yang mereka buat.²

Suatu perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat, yaitu adanya kehendak yang bebas dari pihak-pihak yang hendak mengikatkan diri, kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, objek yang diperjanjikan, dan suatu kausa yang halal

dan tidak dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata.³

Adanya kata sepakat. Suatu perjanjian berdasarkan janji satu pihak berdasarkan kehendak pihak tersebut untuk berjanji. Kehendak satu pihak untuk berjanji kepada pihak lain baru berarti bagi pihak lain manakala kehendak tersebut diucapkan. Pengucapan kehendak suatu pihak dengan maksud agar pihak lain dalam suatu hubungan hukum mengetahui adanya kehendak tersebut dan dapat pula menentukan kehendaknya apakah akan menyetujui kehendak pihak pertama ataukah tidak.⁴ Persesuaian kehendak ini kemudian melahirkan kesepakatan di antara para pihak tersebut. Kesepakatan di antara para pihak merupakan syarat pertama, dan merupakan syarat subjektif. Tiadanya kesepakatan maka tiada pula perjanjian yang sah.⁵

Kesepakatan, pertemuan kehendak dari para pihak yang mengadakan perjanjian haruslah memenuhi dua unsur, yaitu penawaran (*offer*), yaitu pernyataan pihak yang menawarkan

² Daniel D. Barnhizer, "Inequality of Bargaining Power," 76 *University of Colorado Law Review* 139, hlm. 140.

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1995), Cetakan ke XXVII, hlm. 134.

⁴ R. Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju), Cetakan VIII, 2000, hlm., 27.

⁵ *Ibid.*, hlm. 30.

dan penerimaan (*acceptance*), yaitu pernyataan pihak yang menerima penawaran.⁶ Dalam perjanjian, untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi dapat dilihat dari beberapa teori:⁷

1. Teori pernyataan, yaitu sepakat terjadi pada saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut
2. Teori pengiriman, bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. Teori pengetahuan, bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima, walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung.
4. Teori Penerimaan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima jawaban dari pihak lawan.

Kata sepakat harus diberikan secara bebas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdato, yaitu bebas dari cacat kehendak seperti paksaan, penipuan, dan kekhilafan.

Kekhilafan diatur dalam Pasal 1322 KUHPerdato. Suatu perjanjian dianggap telah terjadi kekhilafan apabila terdapat pernyataan sesuai dengan kehendak tetapi kehendak tersebut didasarkan pada gambaran yang keliru baik pada subjek (*error in persona*) maupun objek (*error in substantia*).

Paksaan/*dwang*. Cacat kehendak ini diatur dalam Pasal 1323-1327 KUHPerdato. Paksaan ini terjadi bukan karena kehendak itu sendiri, melainkan karena dipengaruhi oleh orang lain. Paksaan telah terjadi apabila perbuatan tersebut dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan perbuatan tersebut dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut, bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.⁸

Penipuan/*bedrag*. Cacat kehendak ini diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdato. Penipuan merupakan alasan untuk melakukan pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya sedemikian rupa terang dan nyata.⁹

Dalam perkembangannya, muncul unsur keempat dari cacat

⁶ R. Wirjono Projodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 28.

⁷ Mariam Badruzaman, *KUHPerdato Buku III*, (Bandung: Alumni), hlm. 98.

⁸ *Ibid*, hlm. 101.

⁹ R. Wirjono Projodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 34.

kehendak yang tidak diatur dalam KUHPerdota namun terdapat dalam yurisprudensi, yaitu penyalahgunaan keadaan (*undue influence*). Di dalam penyalahgunaan keadaan tidak terjadi ancaman fisik, namun adanya ketergantungan salah satu pihak karena posisi tawar yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya keunggulan ekonomi dan keunggulan psikologis.¹⁰

Doktrin Penyalahgunaan Keadaan: Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak

Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut.¹¹

Ada beberapa asas hukum perjanjian yang dikandung Pasal 1338 KUHPerdota, salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak.¹² Asas kebebasan berkontrak merupakan pondasi dalam sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerdota.

Menurut Rutten, hukum perdata khususnya hukum perjanjian, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia tidak lepas kaitannya dengan Sistem Terbuka yang dianut Buku III KUHPerdota merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat perjanjian.¹³

Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang dikenal dalam Perjanjian Bernama dan isinya menyimpang dari Perjanjian Bernama yang diatur oleh undang-undang.¹⁴

¹⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 58.

¹¹ Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, (Yogyakarta: Liberty), 1999, hlm. 7.

¹² Asas-asas lain yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdota adalah asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas iktikad baik.

¹³ Ridwan Khairandy, *Modul Hukum Kontrak*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII), hlm. 19.

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 36.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian; kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya; kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian; kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullen, optional*).¹⁵

Asas kebebasan berkontrak ini memiliki sifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.¹⁶ Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdato mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.

Menurut sejarahnya, Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdato yang mencerminkan tipe perjanjian pada waktu itu yang berpijak pada Revolusi Perancis, bahwa individu sebagai

dasar dari semua kekuasaan. Pendapat ini menimbulkan konsekuensi, bahwa orang juga bebas untuk mengikat diri dengan orang lain, kapan dan bagaimana yang diinginkan kontrak terjadi berdasarkan kehendak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.¹⁷

Hukum Romawi sendiri tidak mengenal adanya kebebasan berkontrak. Menurut Hukum Romawi, untuk membuat suatu perjanjian yang sempurna tidak cukup dengan persesuaian kehendak saja, kecuali dalam empat hal, yaitu: perjanjian jual beli, sewa-menyewa, persekutuan perdata, dan memberi beban atau perintah (*lastgeving*). Selain keempat jenis perjanjian itu semua perjanjian harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang disebut *causa civilis oligandi*, yaitu untuk mencapai kesepakatan harus disertai dengan kata-kata suci, disertai dengan tulisan tertentu dan disertai pula penyerahan suatu benda.¹⁸

Jadi, konsensus atau persesuaian kehendak saja belum cukup untuk terjadinya perjanjian. Akan tetapi, dalam perkembangannya telah terjadi dalam Hukum Kanonik dengan suatu

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 47.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Modul Hukum Kontrak....*, *Op.Cit*, hlm. 19.

¹⁸ *Ibid.*

asas, bahwa setiap perjanjian meskipun tanpa bentuk tertentu adalah mengikat para pihak, yang disokong oleh moral agama Nasrani yang menghendaki bahwa kata-kata yang telah diucapkan tetap dilaksanakan. Dengan demikian kebebasan berkontrak telah dimulai dalam hukum Kanonik.¹⁹

Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (*bargaining position*) para pihak yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sulit (jika dikatakan tidak mungkin) dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau sejajar. Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi seringkali memaksakan kehendaknya. Dengan posisi yang demikian itu, ia dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dalam perumusan isi perjanjian. Dalam keadaan demikian, pemerintah atau negara seringkali melakukan intervensi atau pembatasan kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk melindungi pihak yang lemah. Pembatasan tersebut dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Pasal 1320 KUHPerdara sendiri sebenarnya membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sahnyanya perjanjian yang harus memenuhi kondisi:

- a. Adanya persetujuan atau kata sepakat para pihak;
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. Adanya objek tertentu; dan
- d. Ada kausa hukum yang halal.

Di negara-negara dengan sistem *common law*, kebebasan berkontrak juga dibatasi melalui peraturan perundang-undangan dan *public policy*. Hukum perjanjian Indonesia juga membatasi kebebasan berkontrak dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pembatasan ini dikaitkan dengan kausa yang halal dalam perjanjian. Berdasar Pasal 1337 KUHPerdara suatu kausa dapat menjadi terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain pembatasan tersebut di atas, ada beberapa hal yang menyebabkan makin berkurangnya asas kebebasan berkontrak, yakni:²⁰ makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik di mana iktikad baik tidak hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada saat perjanjian

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 3.

dibuat dan makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak (*misbruik van omstandigheden, undue influence*).

Penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) merupakan suatu konsep yang berasal dari nilai-nilai yang terdapat di pengadilan. Konsep ini sebagai landasan untuk mengatur transaksi yang berat sebelah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang dominan kepada pihak yang lemah. Penyalahgunaan Keadaan ada ketika pihak yang melakukan suatu perbuatan atau membuat perjanjian dengan cara di bawah paksaan atau pengaruh teror yang ekstrim atau ancaman, atau paksaan penahanan jangka pendek. Ada pihak yang menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan adalah setiap pemaksaan yang tidak patut atau salah, akal bulus, atau bujukan dalam keadaan yang mendesak, di mana kehendak seseorang tersebut memiliki kewenangan yang berlebihan, dan pihak lain dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang tak ingin dilakukan, atau akan berbuat sesuatu jika setelahnya dia akan merasa bebas.²¹

Secara umum ada dua macam penyalahgunaan keadaan, yaitu: *pertama* di mana seseorang meng-

gunakan posisi psikologis dominannya yang digunakan secara tidak adil untuk menekan pihak yang lemah supaya mereka menyetujui sebuah perjanjian di mana sebenarnya mereka tidak ingin menyetujuinya dan kedua, di mana seseorang menggunakan wewenang kedudukan dan kepercayaannya yang digunakan secara tidak adil untuk membujuk pihak lain untuk melakukan suatu transaksi.²²

Menurut doktrin dan yurisprudensi, ternyata perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat seperti itu tetap mengikat para pihak, hanya saja, pihak yang merasakan telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat tersebut dapat memintakan pembatalan perjanjian. Sehubungan dengan ini, Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan bahwa jika di dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terdapat cacat pada kesepakatan antarpara pihak dan karenanya perjanjian itu dapat dibatalkan.

Keseimbangan Posisi Tawar Para Pihak dalam Kontrak

Sebagai suatu konsep yang diakui secara nyata dalam kontrak, konsep ini hanya menempati ruang

²¹ John D. Calamari and Joseph M. Perillo, *Contracts*, (West Publishing Co.), Second Edition, 1977, hlm. 273.

²² *Ibid*, hlm. 274.

kecil dalam hukum kontrak.²³ Konsep ketidakseimbangan posisi tawar dalam perjanjian harus dimulai dengan pemahaman akan kekuatan dalam bernegosiasi (*power*).²⁴ Berkenaan dengan perjanjian, maka kekuatan di sini cenderung mengarah pada kemampuan untuk mempengaruhi perjanjian demi kepentingan satu pihak dengan kekuatan lebih besar atas pihak lain dengan kekuatan lebih rendah. Pernyataan bahwa satu pihak memiliki kekuatan atas pihak lain tidak saja menunjukkan adanya hubungan antara para pihak, namun juga menjelaskan standar yang digunakan mencerminkan konsekuensi praktis atas hubungan pada situasi yang melibatkan kekuatan posisi tawar yang asimetris.²⁵

David Slawson dalam artikelnya yang berjudul *Contractual Discretionary Power: A Law to Prevent Deceptive Contracting by Standard Form*, menyatakan tentang ketidakadilan yang muncul dari fenomena yang ia sebut sebagai "*deceptive contracting by standard form*."²⁶ **Slawson** menyebutkan dengan

menggambarkan dilema di mana ketidakadilan itu muncul. Pada satu sisi, terdapat banyak hal yang dibutuhkan oleh pihak dengan posisi tawar yang lebih kuat (pihak pertama) untuk membuat isi perjanjian dengan tujuan untuk melindungi kepentingannya dalam transaksi. Di sisi lain, pihak pertama maupun pihak dengan posisi tawar lebih rendah (pihak kedua) tidak menyempatkan diri mereka untuk memahami isi perjanjian. **Slawson** menegaskan bahwa pihak kedua tak akan pernah dapat memahaminya karena membutuhkan bantuan profesional yang mengenal seluk beluk kontrak seperti pengacara.²⁷

Slawson menyimpulkan bahwa sepertinya tidak ada pilihan lain kecuali membiarkan pihak pertama menentukan isi kontrak dengan atau tanpa persetujuan pihak kedua. Kontrak atau perjanjian memuat kesepakatan bersama para pihak, karenanya setiap pihak diwajibkan untuk memberikan kesepakatannya berdasarkan perspektif yang logis, di mana pihak pertama seharusnya mewajibkan pihak kedua untuk

²³ Daniel D. Barnhizer, "Inequality of Bargaining Power,"... *Op. Cit.*, hlm. 144.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 192.

²⁶ Daniel D. Barnhizer, "Foreword: Power, Inequality and the Bargain: The Role of Bargaining Power in the Law of Contract-Symposium Introduction," 2006 *Michigan State Law Review* 841, hlm. 844

²⁷ *Ibid.*

membaca dan memahami isi perjanjian.²⁸

Pembatalan Perjanjian

KUHPerdata mengenal syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain:

1. Adanya kata sepakat untuk saling mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat kesepakatan dan kecakapan adalah syarat subjektif, karena mengenai subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif dari suatu perjanjian karena berkenaan dengan perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut.²⁹

Tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan dapat mempunyai arti dapat batal demi hukum, ataupun dapat dimintakan pembatalannya. Berdasarkan alasan kebatalannya, nulitas (batal) dibedakan menjadi perjanjian

yang dapat dibatalkan dan perjanjian yang batal demi hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, berdasarkan sifat kebatalannya, nulitas dibedakan menjadi pembatalan relatif dan pembatalan mutlak.

Pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*), suatu perjanjian dianggap batal walaupun tidak ada permintaan pembatalan dari salah satu pihak. Perjanjian yang demikian dianggap tidak ada sejak semula dan tidak mengikat para pihak. Batal mutlak dilakukan tidak dengan mengindahkan cara (*vorm*) yang dikehendaki oleh undang-undang secara mutlak. Selain itu, perjanjian ini telah melanggar kesusilaan (*geode zeden*) maupun ketertiban umum (*open orde*).³⁰

Pembatalan relatif hanya terjadi apabila dimintakan pembatalannya oleh pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Pembatalan relatif sendiri terbagi menjadi dua. *Pertama* adalah pembatalan atas permintaan wali satu pihak (*nietig atau van rechtswege nietig*), yaitu dimintakan kepada hakim agar perjanjian dinyatakan batal yang disebabkan pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian belum dewasa atau berada di bawah pengawasan.³¹ Bentuk pembatalan relatif yang kedua

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 17.

³⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 151.

³¹ Lihat juga ketentuan dalam Pasal 1446 KUHPerdata.

adalah pembatalan belaka oleh hakim karena hakim berpendapat dalam perjanjian tersebut terdapat paksaan, kekeliruan atau penipuan.³²

Perjanjian yang Dapat Dibatalkan

Pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan, apabila perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak ini dapat berupa para pihak yang terikat di dalam perjanjian ataupun pihak ketiga yang terikat di dalam perjanjian ataupun pihak ketiga yang berada di luar perjanjian. Pembatalan dalam hal ini dapat terjadi pada saat sebelum dilakukannya prestasi ataupun setelah prestasi dilaksanakan. Alasan pembatalan perjanjian dapat dibedakan sebagai berikut.

1. Pembatalan perjanjian oleh satu pihak dalam perjanjian

Pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak ini berkaitan dengan syarat subjektif dari sahny suatu perjanjian, yang berkaitan dengan diri dari subjek

yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan, manakala:

- a. Tidak terjadi kesepakatan bebas dari para pihak, baik itu yang terjadi karena kekhilafan,³³ paksaan,³⁴ ataupun penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian pada saat perjanjian itu dibuat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdata;
- b. Salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, dan atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu atau perbuatan hukum tertentu.

Pada poin (a), pihak yang khilaf, dipaksa, ataupun ditipu, memiliki hak untuk meminta pembatalan perjanjian pada saat ia mengetahui kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Untuk poin (b), pihak

³² Pasal 1449 KUHPerdata.

³³ Pasal 1322 KUHPerdata.

³⁴ Diatur dalam Pasal 1323 sampai dengan Pasal 1327 KUHPerdata. Disebutkan dalam Pasal 1324 KUHPerdata, apabila dianggap ada paksaan yang dapat menjadi alasan untuk melakukan pembatalan perjanjian, di mana paksaan ini memberikan rasa takut kepada salah satu pihak dalam bentuk ancaman apabila ia tidak menyetujui perjanjian tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ancaman tersebut haruslah sesuatu yang tidak dibolehkan oleh hukum. Lihat R. Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hlm., 33.

yang tidak cakap dan/atau wakilnya yang sah berhak untuk memintakan pembatalan perjanjian.³⁵

2. Pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga di luar perjanjian

Pada dasarnya suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan karena itu tidak membawa dampak apapun pada pihak ketiga. Namun demikian, untuk melindungi kepentingan kreditor dalam perikatan dengan debitor, pihak ketiga dapat memintakan pembatalan perjanjian atas perikatan yang dibuat oleh pihak tertentu. Hak tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 1341 ayat (1) KUHPerdara, atau disebut dengan *actio pauliana*. *Actio pauliana* dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kreditor harus membuktikan bahwa debitor melakukan tindakan yang tidak diwajibkan;
- b. Kreditor harus membuktikan bahwa tindakan debitor merugikan kreditor;
- c. Terhadap perikatan timbal-balik yang dibuat oleh debitor dengan suatu pihak tertentu dalam perjanjian, yang meng-

akibatkan berkurangnya harta kekayaan debitor, maka kreditor harus dapat membuktikan pada saat perjanjian tersebut dilakukan, debitor dan orang yang dengannya debitor berjanji, mengetahui bahwa perjanjian tersebut merugikan kreditor;

- d. Untuk perjanjian atau perbuatan hukum yang bersifat cuma-cuma, cukuplah kreditor membuktikan bahwa pada waktu membuat perjanjian atau melakukan tindakan, debitor mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditor, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal ini atau tidak.

Perjanjian yang Batal Demi Hukum

Suatu perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1336 KUHPerdara untuk hal tertentu dan kausa yang halal oleh karena tidak ada prestasi yang dapat dipaksakan pelaksanaannya.³⁶ Oleh karena

³⁵ Lihat ketentuan dalam Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1450 KUHPerdara.

³⁶ Gunawan Widjaja, *Arbitrase vs. Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, (Jakarta: Kencana), hlm. 177.

dalam perjanjian tidak terdapat hal tertentu, maka perjanjian sejak semula tidak ada.

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila prestasi tidak jelas, yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap obyek perjanjian tidak ada dan akibatnya hukum perjanjian tersebut batal demi hukum.³⁷

Dalam Pasal 1337 KUHPerdata diatur bahwa sebab yang tidak halal ialah jika perjanjian dilarang oleh Undang Undang, bertentangan dengan tata susila atau ketertiban, oleh karena itu menurut Pasal 1335 KUHPerdata perjanjian yang tanpa

sebab yang palsu tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.

Pembuktian Penyalahgunaan Keadaan

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata sifatnya tidak absolut. Hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sehingga salah satu pihak tidak bebas menyatakan kehendaknya.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menunjukan telah terjadinya penyalahgunaan keadaan untuk menjadi pertimbangan hakim. Faktor-faktor tersebut adalah kelemahan (*susceptibility*), *confidential relationship*, dan *active procurement*,

Susceptibility, atau kelemahan yang dimiliki salah satu pihak yang dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat baik secara ekonomi maupun secara psikologis.³⁸ Dengan posisi tawar yang lebih kuat, maka pihak dengan posisi tawar tersebut dapat mendikte pihak lain untuk mengikuti kehendaknya.

Confidential relationship. Adanya keterikatan yang erat di antara

³⁷ Lihat ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.

³⁸ Lawrence A. Frolik, "The Biological Roots of the Undue Influence Doctrine: What's Love Got to Do with It?", 57 *University of Pittsburgh Law Review* 841, hlm. 851.

para pihak, di mana salah satu pihak sangat tergantung pada pihak lainnya, sehingga pihak yang lemah mengikuti kemauan dari pihak yang kuat. Dalam hal ini pihak dengan posisi tawar kuat menggunakan wewenang dan kepercayaannya secara tidak adil untuk membujuk pihak lain untuk melakukan suatu transaksi.³⁹

*Active procurement.*⁴⁰ Unsur ketiga dari penyalahgunaan keadaan adalah jika dapat dibuktikan telah terjadi pemaksaan yang tidak patut atau salah, akal bulus, atau bujukan dalam keadaan yang mendesak, di mana kehendak seseorang tersebut memiliki kewenangan yang berlebihan, dan pihak lain dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang tak ingin dilakukan, atau akan berbuat sesuatu jika setelahnya dia akan merasa bebas.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, terlihat bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan bentuk dari cacat kehendak dalam perjanjian. Perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat kehendak tetap mengikat para pihak di dalamnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321, apabila dalam suatu perjanjian mengandung kekhilafan, paksaan, atau penipuan maka telah terjadi cacat kehendak atau cacat kesepakatan dan karenanya perjanjian itu dapat dibatalkan.

Kesimpulan

Sebagai doktrin baru yang lahir dan membatasi asas kebebasan berkontrak, penyalahgunaan keadaan tidak diatur keberadaannya dalam KUHPerdara di Indonesia. Hanya saja, doktrin ini lahir dari yurisprudensi yang merupakan bagian dari cacat kehendak yang dapat dimintakan pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan.

Daftar Pustaka

- Daniel D. Barnhizer, "Foreword: Power, Inequality and the Bargain: The Role of Bargaining Power in the Law of Contract-Symposium Introduction," 2006 *Michigan State Law Review* 841
- _____, "Inequality of Bargaining Power," 76 *University of Colorado Law Review* 139
- Gunawan Widjaja, *Arbitrase vs. Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, Jakarta: Kencana.
- Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, (Yogyakarta: Liberty), 1999

³⁹ *Ibid.*, hlm. 853.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 855.

- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni, 1993.
- John D. Calamari and Joseph M. Perillo, *Contracts*, (West Publishing Co.), Second Edition, 1977.
- Lawrence A. Frolik, "The Biological Roots of the Undue Influence Doctrine: What's Love Got to Do with It?", 57 *University of Pittsburgh Law Review* 841
- Mariam Badruzaman, *KUHPerdata Buku III*, Bandung: Alumni
- R. Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, Cetakan VIII, 2000.
- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Ridwan Khairandy, *Modul Hukum Kontrak*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cetakan ke XXVII, 1995.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.